

Analisis Dilema Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Kerangka Teori Keynesian**Oleh:****¹Umiyati Haris; ²Hubertus Oja; ³Hesty Tambajong**^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Email. umiyatih12@unmus.ac.id

Abstract

Penelitian ini membahas dilema kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 dalam konteks efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan perspektif teori Keynesian. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis pergeseran alokasi anggaran dari belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja ke arah belanja konsumtif, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan kebutuhan administratif lainnya. Data yang dianalisis berasal dari dokumen resmi APBN 2025, pernyataan kebijakan pemerintah, serta sumber-sumber berita ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan, serta analisis data tematik dan visual dalam bentuk grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi, karena efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja strategis yang justru penting untuk mendorong permintaan agregat sebagaimana ditekankan dalam teori Keynesian. Efisiensi anggaran, dalam bentuk penghematan belanja modal dan pemotongan transfer ke daerah, berisiko membatasi ruang fiskal untuk investasi jangka panjang yang memiliki efek multiplier terhadap ekonomi nasional. Sebaliknya, alokasi belanja yang tetap dipertahankan pada sektor konsumtif menunjukkan ineffisiensi dalam orientasi belanja negara. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran tahun 2025 cenderung membatasi pertumbuhan ekonomi nasional karena mengurangi anggaran di sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur, yang justru akan membuka peluang investasi jangka panjang.

Kata kunci : Kebijakan fiskal, efisiensi anggaran, pertumbuhan ekonomi, teori Keynesian**Abstrac**

This study discusses the dilemma of Indonesia's fiscal policy in 2025 in the context of budget efficiency and its impact on economic growth, using the Keynesian theory perspective. The main focus of this study is to analyze the shift in budget allocation from productive spending, such as infrastructure, education, and employment programs, to consumptive spending, including official travel, meetings, and other administrative needs. The data analyzed comes from official 2025 state budget documents, government policy statements, and national economic news sources. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature review method, along with thematic data analysis and visuals presented in the form of graphs. The findings reveal that the government's efficiency policy does not fully support economic growth, as it involves cutting strategic expenditures that are crucial to stimulating aggregate demand, as emphasized in Keynesian theory. Budget efficiency in the form of reduced capital spending and cuts in regional transfers risks limiting fiscal space for long-term investments that have a multiplier effect on the national economy. Conversely, the continued allocation of funds to consumptive sectors indicates inefficiency in the orientation of government spending. Therefore, this study concludes that the 2025 budget efficiency policy tends to restrict national economic growth by reducing the government's role in driving real economic activity. The study recommends that the government balance efficiency measures with strategic investments to ensure sustainable long-term economic growth.

Keywords: Fiscal policy, budget efficiency, economic growth, Keynesian theory

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kebijakan fiskal memegang peran strategis sebagai salah satu instrumen utama pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara demi mencapai tujuan tertentu, seperti menumbuhkan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau menjaga stabilitas harga. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal berkaitan langsung dengan anggaran negara, yaitu berapa banyak uang yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, dan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai program-program publik. Dalam bahasa sederhana, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengelola keuangan negaranya, sama seperti seseorang yang mengatur keuangan rumah tangga, dimana ada pemasukan (gaji/pajak) dan ada pengeluaran (belanja kebutuhan, cicilan, tabungan). Jika dikelola dengan baik, maka ekonomi rumah tangga atau negara bisa tumbuh sehat dan stabil.

Kebijakan fiskal memiliki dua komponen utama, yaitu Penerimaan Negara dan Belanja Negara. Penerimaan Negara atau istilahnya *revenues*, berasal dari pajak, baik pajak penghasilan; pajak pertambahan nilai (PPN); maupun pajak lainnya. Penerimaan ini adalah sumber dana utama negara. Adapun Belanja Negara atau istilahnya *expenditures* memuat uang yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai berbagai hal seperti pendidikan; kesehatan; infrastruktur; subsidi; dan program bantuan sosial (Perdana et al., 2025).

Adapun jenis kebijakan fiskal ada dua, yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kondisi dimana Pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak untuk mendorong ekonomi, biasanya saat kondisi ekonomi sedang lesu atau dalam krisis (Zulfikar et al., 2024). Contohnya adalah ketika pandemi COVID-19 melanda, Pemerintah meningkatkan belanja negara melalui bantuan sosial, subsidi, dan program pemulihan ekonomi. Kedua, Kebijakan Fiskal Kontraktif, dimana Pemerintah mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi atau mengurangi utang negara (Zulaikah, 2025). Contohnya adalah kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025.

Penghematan artinya pemotongan belanja negara secara umum, baik untuk proyek pembangunan, subsidi, atau belanja operasional. Dalam hal ini, pemerintah mengurangi aliran dana ke masyarakat dan perekonomian. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, pemerintah Indonesia menetapkan target belanja negara sebesar Rp3.325 triliun, naik sekitar 5,5% dari tahun sebelumnya (“RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan,” 2024). Namun, di tengah peningkatan belanja tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan target penghematan mencapai Rp306,69 triliun. Angka ini berasal dari pemotongan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan fiskal dan menekan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB (“RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan,” 2024).

Pemerintah menyampaikan bahwa efisiensi ditujukan untuk mengurangi belanja yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas, biaya rapat, dan kegiatan seremonial lainnya. Pemerintah juga menekankan peningkatan efektivitas belanja, agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Prayitno, 2024). Namun, dalam praktiknya di tahun 2025, beberapa alokasi belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan program penyerapan

tenaga kerja justru mengalami pengurangan atau penundaan realisasi akibat kebijakan efisiensi tersebut. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan stagnan di angka 5,2% pada 2025, dengan potensi risiko perlambatan akibat ketidakpastian global dan pelemahan konsumsi domestik (*Outlook Ekonomi Dan Keuangan Di Tahun 2025*, 2025).

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah mengalami berbagai transformasi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, ketidakpastian ekonomi dunia, dan dinamika domestik. Namun, salah satu dilema yang terus muncul adalah bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Utamanya jika dilihat dalam perspektif teori Keynesian, yang menekankan peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat melalui pengeluaran dan pajak. Tulisan ini berupaya mengkaji dilema tersebut dengan fokus pada konteks kebijakan fiskal Indonesia.

Tulisan ini mengerucutkan pembahasan pada efisiensi anggaran di bidang fiskal, terutama dalam kaitannya dengan dilema antara efisiensi dan pertumbuhan. Dalam kerangka teori Keynesian, dilema ini menjadi relevan karena efisiensi sering kali diartikan sebagai pengurangan pengeluaran yang dapat mengurangi permintaan agregat, sementara pertumbuhan ekonomi membutuhkan dorongan melalui belanja pemerintah yang tepat sasaran. Dilema ini semakin kompleks dengan adanya tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi, kebutuhan investasi infrastruktur, dan tekanan utang luar negeri. Fokus utama tulisan ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan fiskal Indonesia mencoba menjawab dilema antara efisiensi dan pertumbuhan, serta menilai sejauh mana teori Keynesian dapat memberikan kerangka berpikir yang relevan untuk mengatasi masalah ini.

Urgensi dari pembahasan ini terletak pada dampak luas kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasional. Dalam situasi di mana pemerintah terus menghadapi keterbatasan anggaran, efisiensi menjadi kata kunci yang sering digunakan. Namun, efisiensi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan risiko stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat diseimbangkan antara efisiensi dan pertumbuhan menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin dinamis.

Topik ini menjadi menarik karena mencerminkan salah satu tantangan utama dalam ekonomi politik modern. Di satu sisi, efisiensi anggaran sering kali dianggap sebagai bentuk tata kelola yang baik, tetapi di sisi lain, kebijakan ini dapat memunculkan *trade-off* yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan mengangkat dilema ini, tulisan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi fiskal yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa kajian yang dijadikan sebagai bahan referensi (*literature review*) bagi tulisan ini. Pertama adalah Penelitian yang berjudul *The Transformational Realities of the Budget Policy of Ukraine in Accordance with the Latent Desiderata of the European Union* (Mychailina, 2018) mengkaji mengenai kebijakan anggaran Ukraina dan Uni Eropa menunjukkan bahwa efisiensi dalam kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperkuat hubungan ekonomi internasional. Temuan ini selaras dengan konteks Indonesia, di mana efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan anggaran secara umum, khususnya struktur pendapatan dan belanja dalam sistem anggaran nasional Ukraina dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan ekonomi dengan Uni Eropa. Cakupannya lebih luas dan berorientasi pada transformasi sistem anggaran untuk mendorong investasi dan integrasi ekonomi. Sedangkan fokus penelitian ini spesifik pada kebijakan efisiensi anggaran Indonesia tahun

2025, dengan pendekatan analisis berdasarkan teori Keynesian, dan menitikberatkan pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama akibat pengalihan anggaran dari sektor produktif ke konsumtif.

Kedua, penelitian dengan judul *Effectiveness of budget expenditures in context budgetary regulation of public development* (Samoshkina, 2021) menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien harus didasarkan pada hasil publik yang jelas, serta evaluasi menyeluruh atas dampak sosial-ekonomi belanja negara. Pendekatan ini relevan dengan konteks efisiensi anggaran Indonesia 2025 yang menuntut orientasi hasil, bukan sekadar pengurangan belanja. Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan anggaran secara umum, khususnya struktur pendapatan dan belanja dalam sistem anggaran nasional Ukraina dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan ekonomi dengan Uni Eropa. Cakupannya lebih luas dan berorientasi pada transformasi sistem anggaran untuk mendorong investasi dan integrasi ekonomi. Sedangkan penelitian ini spesifik pada kebijakan efisiensi anggaran Indonesia tahun 2025, dengan pendekatan analisis berdasarkan teori Keynesian, dan menitikberatkan pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama akibat pengalihan anggaran dari sektor produktif ke konsumtif.

Ketiga, penelitian yang berjudul *The Peculiarities of the Budgetary Policy of Georgia and the Directions of Improvement in Association with EU* (George & Linda, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran secara anti-rasional dalam bentuk alokasi yang tidak tepat terhadap program produktif menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan ini relevan dengan situasi efisiensi anggaran Indonesia tahun 2025, di mana penghematan tidak diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi. Penelitian tersebut fokus dalam menelaah peran kebijakan anggaran terhadap pembangunan sosial-ekonomi, serta anti-rasionalitas penggunaan dana anggaran dalam program pemerintah. Sedangkan penelitian ini Menyoroti efisiensi anggaran tahun 2025 di Indonesia, terutama pengalihan belanja dari sektor produktif ke konsumtif, serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dalam kerangka teori Keynesian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kebijakan fiskal secara mendalam, terutama dalam konteks pergeseran alokasi anggaran dari sektor produktif ke sektor konsumtif serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah, publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laporan APBN 2025, berita ekonomi dari media nasional. Data sekunder tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi arah kebijakan efisiensi serta implikasinya terhadap belanja negara, baik dalam aspek belanja produktif maupun konsumtif. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan kerangka teori Keynesian, yang menekankan pentingnya belanja pemerintah sebagai instrumen penggerak permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya justru membatasi ruang fiskal untuk investasi strategis. Teknik analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tema utama: (1) realisasi efisiensi anggaran, (2) pergeseran alokasi anggaran, (3) implikasi terhadap belanja produktif dan konsumtif, serta (4) konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data-data kuantitatif yang ditemukan juga diolah dalam bentuk grafik untuk memperkuat penyajian analisis, sehingga dapat

memberikan gambaran visual mengenai kondisi aktual kebijakan anggaran 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

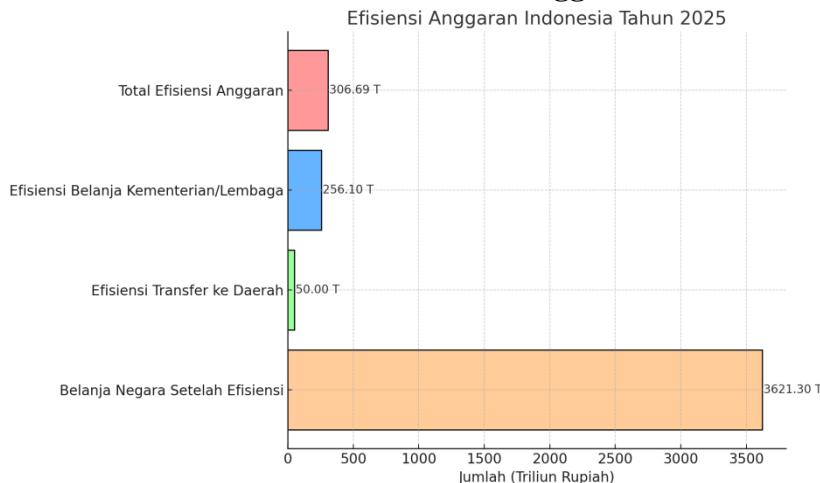
Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inpres ini menginstruksikan kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan peninjauan kembali anggaran belanja guna mencapai efisiensi yang signifikan (*Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, 2025).

Salah satu poin utama dari Inpres tersebut adalah penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari anggaran kementerian/lembaga, sementara Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah (“Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” 2025). Meskipun terdapat upaya efisiensi, total belanja negara setelah penghematan tetap ditetapkan pada angka Rp3.621,3 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada bulan Januari 2025, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp211,5 triliun, atau 7,8% dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp83,6 triliun (7,2% dari target), dan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp136,6 triliun, atau 14,9% dari target (“APBN 2025 Masih Terjaga Di Tengah Tekanan Global,” 2025). Namun, data APBN Januari 2025 menunjukkan bahwa penerimaan negara mencapai Rp115,18 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp180,77 triliun, mengakibatkan defisit sebesar Rp65,59 triliun. Ini merupakan defisit Januari pertama sejak tahun 2021 (“Sri Mulyani Rilis Data APBN Kita, Ini Postur Lengkap APBN Januari 2025,” 2025).

Dalam upaya mencapai efisiensi, beberapa kementerian mengalami pemotongan anggaran. Misalnya, anggaran Kementerian Keuangan dipangkas sebesar Rp8,99 triliun (“APBN 2025,” 2025). Meskipun terdapat pemotongan anggaran, pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas belanja negara. Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan publik (*Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, 2025). Meskipun terdapat upaya efisiensi anggaran yang signifikan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kualitas belanja negara. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengorbankan program-program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

Gambar 1.1 Efisiensi Anggaran Indonesia Tahun 2025

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Grafik 1.1 di atas menggambarkan realisasi kebijakan efisiensi anggaran Indonesia pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang berasal dari dua sumber utama, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun. Penghematan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan merespons dinamika ekonomi global yang menuntut pengelolaan anggaran negara secara lebih hati-hati.

Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa porsi terbesar efisiensi berasal dari pemotongan belanja di kementerian/lembaga. Artinya, berbagai program kerja dan kegiatan strategis yang sebelumnya direncanakan oleh K/L mengalami penyesuaian. Sementara itu, efisiensi pada transfer ke daerah juga berpotensi berdampak pada pengurangan dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk belanja infrastruktur, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Di sisi lain, terdapat data yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran justru mengurangi sektor produktif seperti pendidikan, dimana anggaran pendidikan dikurangi sebesar Rp. 8 triliun pada tahun 2025 (Mashabi & Prastiwi, 2025). Sektor lain yang tergolong produktif seperti infrastruktur juga terkena dampak pengurangan anggaran (“Anggaran Infrastruktur Dikurangi Untuk Makan Bergizi Gratis,” 2025). Sektor produktif dikurangi anggarannya dan justru sektor non produktif seperti anggaran rapat tetap diberikan (Medi & Salam, 2025) sehingga efisiensi anggaran hanya diperuntukkan untuk hal yang konsumtif.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar, total belanja negara setelah efisiensi masih mencapai Rp3.621,3 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai program nasional. Terdapat adanya pergeseran alokasi anggaran dari sektor produktif ke sektor yang bersifat konsumtif, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan kebutuhan administratif lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas efisiensi tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara teoritis, dalam perspektif Keynesian, belanja pemerintah memiliki peran vital dalam menstimulasi permintaan agregat. Oleh karena itu, pengurangan belanja produktif justru berisiko memperlambat laju pertumbuhan dan membatasi ruang fiskal untuk investasi strategis.

Peran aktif pemerintah melalui belanja publik merupakan kunci utama dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat sektor swasta mengalami stagnasi. Menurut John Maynard Keynes, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, yang selanjutnya merangsang produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional (Dismalasari, 2024). Sehingga, kebijakan fiskal, khususnya belanja publik, dianggap sebagai alat yang efektif untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perspektif Keynesian tersebut, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dengan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, perlu dianalisis dari sisi struktur belanja yang dikurangi. Dari total efisiensi itu, sekitar Rp256,1 triliun dipangkas dari belanja kementerian/lembaga, dan Rp50 triliun dari transfer ke daerah. Namun, yang menjadi persoalan penting adalah pos-pos anggaran yang mengalami pemotongan justru mencakup belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan proyek padat karya yang berpotensi mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Dalam teori Keynesian, pemotongan terhadap belanja produktif ini bisa berdampak kontraktif terhadap perekonomian, karena mengurangi *multiplier effect* yang muncul dari pengeluaran pemerintah (Sevianti et al., 2025). Misalnya, investasi infrastruktur tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan melalui perbaikan konektivitas dan logistik. Demikian pula, belanja pendidikan memperkuat kualitas sumber daya manusia, yang merupakan fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Salah satu temuan penting adalah adanya kecenderungan penghematan yang menyasar belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur; pendidikan; dan program lapangan kerja. Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa sebagian dana efisiensi tetap dialokasikan ke belanja administratif dan konsumtif, seperti perjalanan dinas; biaya rapat; dan kegiatan seremonial, meskipun diklaim telah mengalami pengurangan. Kondisi ini menunjukkan potensi terjadinya paradoks kebijakan efisiensi, yakni ketika penghematan justru menurunkan daya dorong fiskal terhadap ekonomi riil. Ketika efisiensi anggaran justru mengurangi belanja strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, dan mengalihkan dana tersebut untuk menutup belanja konsumtif seperti perjalanan dinas; rapat; dan konsumsi aparatur, maka ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Dari kacamata Keynesian, ini merupakan pemanfaatan fiskal yang tidak optimal, karena belanja pemerintah tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun daya beli masyarakat.

Data APBN 2025 menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi, total belanja negara tetap ditetapkan pada angka Rp3.621,3 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,53% dari PDB (“APBN 2025 Masih Terjaga Di Tengah Tekanan Global,” 2025). Namun, struktur belanja yang dikontraktsikan lebih banyak menyasar sektor produktif. Hal ini berisiko membuat pertumbuhan ekonomi melambat, karena stimulus fiskal ke sektor riil berkurang. Padahal, Keynes menyatakan bahwa pada saat ekonomi tidak berada pada titik full employment, belanja pemerintah harus ditingkatkan untuk mendorong utilisasi sumber daya yang menganggur (Elpisah, 2022).

Dalam konteks Indonesia tahun 2025, pemotongan anggaran yang menekan belanja pembangunan justru mengurangi kemampuan negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang masih terdampak pascapandemi. Sebaliknya, belanja tidak produktif yang dipertahankan atau bahkan ditingkatkan hanya bersifat jangka pendek dan tidak memiliki dampak besar terhadap output nasional. Ini bertentangan dengan prinsip Keynesian yang mendorong pengalokasian belanja negara secara efektif ke sektor-sektor yang menciptakan *multiplier effect*.

Data APBN 2025 menunjukkan penurunan proporsi belanja modal dan pembangunan daerah akibat efisiensi. Realisasi belanja untuk infrastruktur hanya tumbuh tipis dari tahun sebelumnya, dan beberapa proyek strategis mengalami penundaan. Dalam teori Keynesian, belanja produktif seperti ini merupakan instrumen penting untuk mendorong permintaan agregat, terutama dalam masa pemulihan ekonomi (Rahmayanti et al., 2025). Pengurangan belanja produktif berisiko memperlambat stimulus ekonomi, terutama bagi sektor riil dan tenaga kerja.

Selain itu, pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun juga memiliki dampak kontraproduktif, karena daerah-daerah menjadi kehilangan kapasitas fiskal untuk membiayai proyek pembangunan lokal. Ini berpotensi meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta melemahkan fungsi fiskal desentralisasi. Padahal, Keynesian menekankan bahwa stimulus fiskal sebaiknya diarahkan merata, agar efeknya dapat menyentuh sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Salah satu konsekuensi paling krusial dari kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa penghematan anggaran tidak hanya terjadi pada pos belanja konsumtif, melainkan juga menasar belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Menurut data Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 2025), terjadi penyesuaian atau pengurangan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp53 triliun, termasuk pemangkasan pada proyek-proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi riil. Hal ini berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri penunjang.

Berdasarkan teori Keynesian, belanja pemerintah adalah salah satu komponen penting dari permintaan agregat. Ketika pemerintah memangkas belanja strategis, maka daya dorong terhadap aktivitas ekonomi akan melemah. Efek lanjutannya adalah konsumsi masyarakat cenderung stagnan, investasi swasta terhambat, dan pendapatan negara dari pajak juga menurun karena melambatnya kegiatan ekonomi. Ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang cenderung stagnan di kisaran 5,2%.

Konsekuensi lainnya adalah peningkatan ketimpangan fiskal antar daerah. Pemotongan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun berpotensi mengganggu program-program pembangunan di tingkat lokal, terutama di daerah tertinggal yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di daerah tidak berjalan optimal dan menciptakan disparitas yang semakin lebar antar wilayah.

Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada penurunan kepercayaan investor. Ketidakjelasan arah prioritas fiskal dan pengalihan belanja dari sektor produktif ke belanja konsumtif menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung iklim investasi jangka panjang. Hal ini dapat memicu arus modal keluar dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

Dengan merujuk pada data dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, dalam bentuk pengurangan belanja produktif, cenderung membatasi ruang fiskal untuk investasi strategis. Efisiensi yang tidak diarahkan secara tepat, melainkan mengorbankan belanja yang seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan, tidak mendukung agenda pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebagaimana dianjurkan oleh teori Keynesian. Sebaliknya, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan resesi fiskal, yaitu kondisi di mana belanja negara tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan, sementara sektor swasta belum mampu mengambil alih peran tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penurunan belanja produktif memperbesar risiko stagnasi ekonomi, apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan investasi swasta yang signifikan.

Efisiensi anggaran seharusnya difokuskan pada penghapusan belanja tidak produktif seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi, dan rapat-rapat, serta mengalokasikan lebih banyak dana ke belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, belanja negara dapat menjadi motor pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan output nasional.

KESIMPULAN

Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran alokasi anggaran dari sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja ke arah belanja konsumtif yang berorientasi administratif, seperti biaya perjalanan dinas dan rapat. Dalam teori Keynesian, belanja pemerintah merupakan komponen penting dalam mendorong permintaan agregat, sehingga pengurangan belanja strategis dapat menurunkan daya dorong fiskal terhadap aktivitas ekonomi. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi justru terhambat dan dapat memperbesar risiko perlambatan ekonomi nasional.

Efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada belanja yang benar-benar tidak produktif dan diiringi dengan penguatan belanja strategis yang memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada optimalisasi alokasi anggaran untuk pertumbuhan jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan investasi strategis, sehingga ruang fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Orientasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan fondasi ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Infrastruktur Dikurangi untuk Makan Bergizi Gratis. (2025). *Tempo.Com*. <https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-infrastruktur-dikurangi-untuk-makan-bergizi-gratis-1195039>
- APBN 2025. (2025). *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/tags/apbn-2025>
- APBN 2025 Masih Terjaga di Tengah Tekanan Global. (2025). *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9081/apbn-2025-masih-terjaga-di-tengah-tekanan-global>
- Dismalasari, D. (2024). *Perekonomian Indonesia*. Gita Lentera.
- Elpisah, E. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro*. Pena Persada.
- George, A., & Linda, M. (2020). The Peculiarities of the Budgetary Policy of Georgia and the Directions of Improvement in Association with EU. *SHS Web of Conferences*, 73, 01001.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. (2025). *Smart ID*. <https://smartid.co.id/instruksi-presiden-inpres-nomor-1-tahun-2025/>
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2025). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. (2025). *Informasi APBN 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025>
- Medi, W., & Salam, H. (2025). Pemerintah-DPR Rapat di Hotel Mewah, Apa Kabar

- Efisiensi Anggaran? *Kompas.Id.* <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-dpr-rapat-di-hotel-mewah-apa-kabar-efisiensi-anggaran>
- Mychailina, F. (2018). The Transformational Realities of the Budget Policy of Ukraine in Accordance with the Latent Desiderata of the European Union. *Biznes Inform*, 7(486), 202–210.
- Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025.* (2025). [Webinar]. OJK Institute. <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4588/outlook-ekonomi-dan-keuangan-di-tahun-2025#:~:text=Memasuki%20tahun%202025%2C%20World%20Bank,investasi%20opada%20sektor%2Dsektor%20strategis>
- Perdana, E., Soebagijo, D., & Indira, M. (2025). Analisis Utang Pemerintah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia 2014-2023. *Center of Economic Students Journal*, 8(1). <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/1073>
- Prayitno, J. (2024). Upaya Efisiensi Belanja Akhir Tahun Anggaran 2024 melalui Penghematan Sisa Pagu Perjalanan Dinas. *DJPB Kemenkeu*. <https://djpbc.kemenkeu.go.id/kppn/manna/id/data-publikasi/berita-terbaru/3152-upaya-efisiensi-belanja-akhir-tahun-anggaran-2024-melalui-penghematan-sisa-pagu-perjalanan-dinas.html>
- Rahmayanti, V., Syahraeni, S., & Nurham, Muh. (2025). Menyelami APBN Indonesia: Potret Anggaran dan Analisis Perkembangan dari Periode ke Periode. *Jurnal Ikraith Ekonomika*, 8(1). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/4544>
- RAPBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. (2024). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2025>
- Samoshkina, O. (2021). Effectiveness of budget expenditures in context budgetary regulation of public development. *Економічний Вісник Університету*, 48, 225–231.
- Sevianti, S., Darmawati, D., Badran, A., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan Kebijakan Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2662>
- Sri Mulyani Rilis Data APBN Kita, Ini Postur Lengkap APBN Januari 2025. (2025). *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250312/10/1860618/sri-mulyani-rilis-data-apbn-kita-ini-postur-lengkap-apbn-januari-2025>
- Zulaikah, Z. (2025). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3900>
- Zulfikar, J., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pemikiran Dan Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/58>